

**PENGARUH PENAWARAN UANG DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK
DOMESTIK BRUTO (PDB) DI INDONESIA
(1987-1997)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	1 — 9 — 1998
Asal dari	FAK. EKONOMI
Kategori	ILSAT/EXS.
Urut	HADIAH
No. Inventaris	94010229
No. Kas	

Oleh:

**KAMARUDDIN A
93 01 120**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998**

PENGARUH PENAWARAN UANG DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO
(PDB) DI INDONESIA
(1987-1997)

OLEH
KAMARUDDIN A
93 01 120

SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI JURUSAN
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



(DR. M.H. PAPAYUNGAN, MA)

PEMBIMBING II



(Drs. L.P. TULUNG, MS)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan walaupun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa, kemampuan menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran dalam bentuk sistematis dan ilmiah yang penulis miliki masih sangat kurang, maka tidak tertutup kemungkinan dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang akan ditemukan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran atau kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan masukan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Bapak DR. M.M. Papayungan, MA dan Bapak Drs. L.P. Tulung, MS, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerelaan hati telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat di rampungkan.

Selanjutnya ucapan terima kasih pula, penulis haturkan kepada :

- Bapak DR. Djabir Hamzah, MA, selaku Dekan pada Fakultas

Ekonomi Universitas Hasanuddin

- Bapak Drs.A.Kahar Akil, MS, selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Bapak A. Baso Siswadarna, SE, selaku Penasehat Akademik dan seluruh staf dosen, yang mendidik sejak masuk Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai selesai study
- Bapak Pimpinan, beserta staf dan karyawan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang, atas segala bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini
- Bapak Pimpinan, beserta staf dan karyawan Biro Pusat Statistik (BPS) Cabang Ujung Pandang, atas segala bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini
- Ayahanda Ali Paggama dan Ibunda Sitti Hawa tercinta yang dengan segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, membimbing serta iringan doa dan curahan kasih sayang dalam membesarkan penulis, baik suka maupun duka yang tidak kenal lelah serta tak henti-hentinya memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan study

Akhirnya ucapan terima kasih penulis tujukan pula kepada Bapak Andi Gamalca, SE, Bapak H. Andi Yanwar, Ibu Hj. Sitti Sapiah beserta seluruh keluarga yang banyak memberikan bantuan, baik moral maupun materiil serta motivasi kepada penulis, dan semua pihak yang tidak

Ekonomi Universitas Hasanuddin

- Bapak Drs.A.Kahar Akil, MS, selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Bapak A. Baso Siswadarma, SE, selaku Penasehat Akademik dan seluruh staf dosen, yang mendidik sejak masuk Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai selesai study
- Bapak Pimpinan, beserta staf dan karyawan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang, atas segala bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini
- Bapak Pimpinan, beserta staf dan karyawan Biro Pusat Statistik (BPS) Cabang Ujung Pandang, atas segala bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini
- Ayahanda Ali Paggama dan Ibunda Sitti Hawa tercinta yang dengan segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, membimbing serta iringan doa dan curahan kasih sayang dalam membesarkan penulis, baik suka maupun duka yang tidak kenal lelah serta tak henti-hentinya memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan study

Akhirnya ucapan terima kasih penulis tujukan pula kepada Bapak Andi Gamalca, SE, Bapak H. Andi Yanwar, Ibu Hj. Sitti Sapiah beserta seluruh keluarga yang banyak memberikan bantuan, baik moral maupun materiil serta motivasi kepada penulis, dan semua pihak yang tidak

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.3 Hipotesis	5
BAB II : METODOLOGI	6
2.1 Kerangka Analisis	6
2.2 Kerangka konsepsional	8
2.3 Metode Penelitian	11
2.4 Jenis dan Sumber data	11
2.5 Metode Analisis	12
2.6 Batasan Variabel	14
2.6.1 Penawaran Uang	14
2.6.2 Pengeluaran Pemerintah	15
2.6.3 Ekspor	16
2.6.4 Produk Domestik Bruto	16
2.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	18
3.1 Penadaptasi Nasional	18

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.3 Hipotesis	5
BAB II : METODOLOGI	6
2.1 Kerangka Analisis	6
2.2 Kerangka konsepsional	8
2.3 Metode Penelitian	11
2.4 Jenis dan Sumber data	11
2.5 Metode Analisis	12
2.6 Batasan Variabel	14
2.6.1 Penawaran Uang	14
2.6.2 Pengeluaran Pemerintah	15
2.6.3 Ekspor	16
2.6.4 Produk Domestik Bruto	16
2.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	18
3.1 Penadapatan Nasional	18

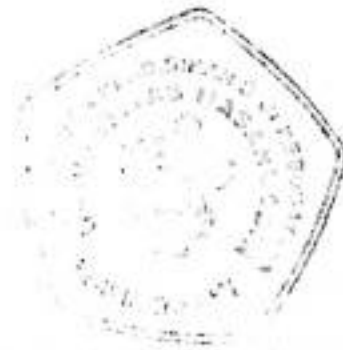
	3.2 Teori Moneter	21
	3.2.1 Teori Kuantitas	21
	3.2.2 Teori Keynes	24
	3.2.3 Teori Moneteris	27
	3.2.4 Transmisi Moneter Menurut Keynes dan moneteis	28
	3.3 Pengeluaran Pemerintah	30
	3.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerin- tah	30
	3.3.2 Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi	33
	3.3.3 Pengeluaran Pemerintah dan Pen- dapatan Nasional	35
	3.4 Ekspor dan Pembangunan Ekonomi ...	39
BAB IV	: PRODUK DOMESTIK BRUTO, PENAWARAN UANG PENGELUARAN PEMERINTAH DAN EKSPOR INDONESIA	41
	4.1 Produk Domestik Bruto	41
	4.2 Penawaran Uang	52
	4.3 Pengeluaran Pemerintah	55
	4.4 Ekspor	65
	4.5 Pengaruh Penawaran Uang, Penge- luaran Pemerintah dan Ekspor ter- hadap PDB	69
BAB V	: PENUTUP	72
	5.1 Simpulan	72

5.2 Saran-saran	74
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	76
----------------------	----

Lampiran 1

Lampiran 2



BAB I PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam tingkat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah sering diperhadapkan oleh berbagai macam gejala yang timbul dalam perekonomian, seperti tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dan sebagainya. Dalam menghadapi gejala seperti ini, diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah timbulnya gejala-gejala seperti tersebut di atas.

Oleh karena gejala-gejala tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi secara agregatif, maka kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijaksanaan ekonomi makro. Menurut Sadono Sukirno ada tiga bentuk kebijaksanaan ekonomi makro yang dapat dijalankan antara lain :

- Kebijakan Moneter
- Kebijakan Fiskal
- Kebijakan Segi Penawaran. 1)

1) Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, hal. 25

Kebijaksanaan moneter meliputi semua langka-langka pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (BI) untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi dan apabila tingkat bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan. dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal.

Kebijaksanaan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini dapat menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan, sehingga menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk

membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Kebijaksanaan Segi Penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijaksanaan segi penawaran adalah kebijaksanaan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatn pekerja. Ini mencegah kenaikan tingkat upah melebihi kenaikan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya akan menghindari kenaikan biaya produksi.

Semenjak tahun 1969, Indonesia memasuki era baru dalam pembangunan ekonominya. Dibidang ekonomi banyak diambil kebijaksanaan baru untuk menangani kondisi perekonomian yang kurang sehat sebagai warisan dari masa orde lama. Berbagai kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Repelita, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Di bidang moneter antara lain ditandai dengan pembaharuan sistem perbankan melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank sentral.

Sebelum deregulasi 1 Juni 1983, pengendalian penawaran uang di Indonesia, terutama diusahakan melalui pagu kredit dan hal ini dibarengi dengan tingkat suku bunga kredit yang rendah. Tingkat bunga yang rendah, dapat

merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Bagi setiap negara dengan ekonomi terbuka pada perdagangan luar negeri, ekspor akan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan kelancaran pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bagi Indonesia sebagai sebuah ekonomi terbuka, kemungkinan pengaruh tersebut jelas tidak akan dapat dihindarkan sama sekali, sebab Indonesia memiliki kekayaan alam yang sebagian besar masih bersifat potensial dan cukup banyak bergantung pada perdagangan luar negeri.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penulis bermaksud untuk membahas masalah penawaran uang dan pengeluaran pemerintah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan judul:

**"PENGARUH PENAWARAN UANG DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA"**

PERIODE 1987-1997

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang utama antara lain :

- Berapa besar hubungan dan pengaruh jumlah penawaran uang dan pengeluaran pemerintah serta ekspor terhadap produk domestik bruto di Indonesia ?

- Bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut ?

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menggambarkan perkembangan jumlah penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor Indonesia serta pengaruhnya terhadap produk domestik bruto. Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan tentang jumlah penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan eksport Indonesia.

1.3. Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, maka penulis penulis mengemukakan beberapa hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa hubungan dan pengaruh penawaran uang dan pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto adalah positif dan signifikan.
2. Diduga bahwa hubungan dan pengaruh ekspor terhadap produk domestik bruto adalah positif dan signifikan.

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Analisis

Perkembangan penawaran uang di Indonesia merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Analisa penawaran uang di Indonesia meliputi dalam arti sempit (M_1) yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D) yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$M_1 = C + D \quad 2)$$

Sedangkan penawaran uang dalam arti luas (M_2) adalah merupakan penjumlahan dari M_1 dengan deposito berjangka atau dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$M_2 = M_1 + TD \quad 3)$$

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dipakai sebagai ukuran besarnya kegiatan pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam perekonomian indonesia dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto. Meningkatnya pengeluaran

2) DR. Boediono, Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga 1988, BPFE-Yogyakarta, Hal. 4

3) Ibid, Hal. 9

pemerintah akan membawa pengaruh pelipatan yang besar dalam seluruh perekonomian, sebab kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah proyek-proyek yang bersifat umum dan kurang menarik bagi pengusaha swasta di Indonesia.

Indonesia tergolong ke dalam kelompok negara eksportir komoditi primer, karena struktur permintaan dan penawaran barang ekspornya masih sangat diwarnai oleh kondisi alam yang dimilikinya. Lebih penting lagi, Indonesia adalah suplier hasil-hasil tambang terutama minyak bumi dan gas alam. Bagi ekonomi dalam negeri, kegiatan ekspor akan memberikan hasil dalam bentuk devisa yang sangat diperlukan bagi kepentingan impor barang modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tahapan analisa terakhir akan digunakan metode analisa regresi linear berganda untuk melihat pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto di Indonesia dalam kurun waktu 1987-1997. Dari hasil regresi berganda tersebut akan diperoleh tiga macam koefisien, yaitu koefisien regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Koefisien regresi menggambarkan besarnya pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto. Koefisien korelasi menggambarkan eratnya hubungan antara penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto.

Sedangkan koefisien determinasi menerangkan variasi perubahan produk domestik bruto yang disebabkan oleh variasi perubahan dalam penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor.

2.2. Kerangka Konseptual

Penawaran uang dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penawaran uang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas, penawaran uang terdiri dari penawaran uang dalam arti sempit ditambah dengan deposito berjangka.

Hubungan penawaran uang dengan produk domestik bruto dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$M V = P T = Y \text{ 4)}$$

dimana :

M = Penawaran Uang

V = Kecepatan perputaran uang terhadap pendapatan
(income velocity of money)

P = Harga

T = Transaksi

Y = Pendapatan Nasional (produk domestik bruto)

Dengan demikian seluruh pengeluaran uang untuk barang dan jasa adalah sama dengan penawaran uang dikalikan dengan kecepatan perputaran uang.

4) D.G. Lockett, Uang dan Perbankan, di Indonesia-kan oleh Paul C. Rosyadi, Ph. B Edisi kedua 1983, Erlang-ga, Jakarta, hal. 442

Sedangkan koefisien determinasi menerangkan variasi perubahan produk domestik bruto yang disebabkan oleh variasi perubahan dalam penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor.

2.2. Kerangka Konseptual

Penawaran uang dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penawaran uang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas, penawaran uang terdiri dari penawaran uang dalam arti sempit ditambah dengan deposito berjangka.

Hubungan penawaran uang dengan produk domestik bruto dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$M V = P T = Y \text{ 4)}$$

dimana :

M = Penawaran Uang

V = Kecepatan perputaran uang terhadap pendapatan
(income velocity of money)

P = Harga

T = Transaksi

Y = Pendapatan Nasional (produk domestik bruto)

Dengan demikian seluruh pengeluaran uang untuk barang dan jasa adalah sama dengan penawaran uang dikalikan dengan kecepatan perputaran uang.

4) D.G. Lockett, Uang dan Perbankan, di Indonesia-kan oleh Paul C. Rosyadi, Ph. B Edisi kedua 1983, Erlangga, Jakarta, hal. 442

Pengaruh penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi dikemukakan oleh Richard Cantillon sebagai berikut :

- Suatu penambahan penawaran uang disebuah negara akan menyebabkan orang-orang berbelanja lebih banyak, dan
- Pembelanjaan yang lebih banyak ini akan menyebabkan suatu penambahan dalam produksi nasional. 5)

Jumlah penawaran uang pada suatu saat akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat untuk barang dan jasa. selanjutnya naik turunnya pengeluaran konsumsi masyarakat (agregat demand) akan menentukan perkembangan produk domestik bruto (pendapatan nasional). Apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat bunga akan turun. Turunnya tingkat bunga akan menambah investasi dan selanjutnya melalui multiplier akan memperbesar produk domestik bruto.

Selanjutnya akan dijelaskan hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah dan ekspor adalah merupakan komponen-komponen produk domestik bruto sebagaimana akan terlihat dalam persamaan di bawah ini,

$$Y = C + I + G + (X-M) \text{ 6)}$$

5) D.G. Lockett, *Ibid*, hal. 439
 6) Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro, Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, Edisi Keempat 1985, Liberty, Yogyakarta, Hal 20.

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Analisis

Perkembangan penawaran uang di Indonesia merupakan faktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Analisa penawaran uang di Indonesia meliputi dalam arti sempit (M_1) yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D) yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$M_1 = C + D \quad 2)$$

Sedangkan penawaran uang dalam arti luas (M_2) adalah merupakan penjumlahan dari M_1 dengan deposito berjangka atau dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$M_2 = M_1 + TD \quad 3)$$

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah di Indonesia dapat dipakai sebagai ukuran besarnya kegiatan pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto. Meningkatnya pengeluaran

2) DR. Boediono, Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga 1988, BPFE-Yogyakarta, Hal. 4

3) Ibid, Hal. 9

pemerintah akan membawa pengaruh pelipatan yang besar dalam seluruh perekonomian, sebab kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah proyek-proyek yang bersifat umum dan kurang menarik bagi pengusaha swasta di Indonesia.

Indonesia tergolong ke dalam kelompok negara eksportir komoditi primer, karena struktur permintaan dan penawaran barang ekspornya masih sangat diwarnai oleh kondisi alam yang dimilikinya. Lebih penting lagi, Indonesia adalah suplier hasil-hasil tambang terutama minyak bumi dan gas alam. Bagi ekonomi dalam negeri, kegiatan ekspor akan memberikan hasil dalam bentuk devisa yang sangat diperlukan bagi kepentingan impor barang modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai tahapan analisa terakhir akan digunakan metode analisa regresi linear berganda untuk melihat pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto di Indonesia dalam kurun waktu 1987-1997. Dari hasil regresi berganda tersebut akan diperoleh tiga macam koefisien, yaitu koefisien regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Koefisien regresi menggambarkan besarnya pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto. Koefisien korelasi menggambarkan eratnya hubungan antara penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto.

Sedangkan koefisien determinasi menerangkan variasi perubahan produk domestik bruto yang disebabkan oleh variasi perubahan dalam penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor.

2.2. Kerangka Konseptual

Penawaran uang dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penawaran uang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas, penawaran uang terdiri dari penawaran uang dalam arti sempit ditambah dengan deposito berjangka.

Hubungan penawaran uang dengan produk domestik bruto dapat dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$M V = P T = Y \text{ 4)}$$

dimana :

M = Penawaran Uang

V = Kecepatan perputaran uang terhadap pendapatan
(income velocity of money)

P = Harga

T = Transaksi

Y = Pendapatan Nasional (produk domestik bruto)

Dengan demikian seluruh pengeluaran uang untuk barang dan jasa adalah sama dengan penawaran uang dikalikan dengan kecepatan perputaran uang.

4) D.G. Lockett, Uang dan Perbankan, di Indonesia-kan oleh Paul C. Rosyadi, Ph. B Edisi kedua 1983, Erlangga, Jakarta, hal. 442

Pengaruh penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi dikemukakan oleh Richard Cantillon sebagai berikut :

- Suatu penambahan penawaran uang disebuah negara akan menyebabkan orang-orang berbelanja lebih banyak, dan
- Pembelanjaan yang lebih banyak ini akan menyebabkan suatu penambahan dalam produksi nasional. 5)

Jumlah penawaran uang pada suatu saat akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat untuk barang dan jasa. selanjutnya naik turunnya pengeluaran konsumsi masyarakat (agregat demand) akan menentukan perkembangan produk domestik bruto (pendapatan nasional). Apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat bunga akan turun. Turunnya tingkat bunga akan menambah investasi dan selanjutnya melalui multiplier akan memperbesar produk domestik bruto.

Selanjutnya akan dijelaskan hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap produk domestik bruto. Secara teoritis, pengeluaran pemerintah dan ekspor adalah merupakan komponen-komponen produk domestik bruto sebagaimana akan terlihat dalam persamaan di bawah ini,

$$Y = C + I + G + (X-M) \text{ 6)}$$

5) D.G. Lockett, *Ibid*, hal. 439

6) Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, Edisi Keempat 1985, Liberty, Yogyakarta, Hal 20.

dimana :

- Y = Produk Domestik Bruto
- C = Konsumsi
- I = Investasi
- G = Pengeluaran pemerintah
- X = Ekspor
- M = Impor

Dari persamaan tersebut di atas terlihat bahwa peningkatan produk domestik bruto dapat terjadi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan peningkatan ekspor. Apabila pengeluaran pemerintah dapat memacu investasi swasta, maka pengaruhnya terhadap produk domestik bruto dapat berlipat ganda.

Dalam kerangka hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Myint sebagai berikut :

(1) Perluasan ekspor akan meningkatkan keuntungan langsung dari perdagangan dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, (ii) Ekspor memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi terutama melalui penediaan devisa untuk pembelian barang modal dan input lainnya dari luar negeri; (iii) Perdagangan yang lebih bebas dan perluasan ekspor secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap efisiensi produksi di dalam negeri, mempermudah penyebaran kebutuhan-kebutuhan dan kegiatan baru, teknologi baru serta organisasi ekonomi yang baru. 7)

7) Syarifuddin Karimi, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dalam Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Agustus 1986, Jilid XIII No. 2 LIPI-Jakarta, Hal. 201



2.3. Metode Penelitian.

Dalam upaya untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penelitian studi kepustakaan yang bersifat pengujian atas hipotesa yang diajukan berdasarkan kerangka analisis tertentu untuk menerangkan penawaran uang, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dalam pengaruhnya terhadap produk domestik bruto di Indonesia.

2.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data time series pada tahun 1987-1997. Adapun data yang dimaksud yaitu tentang jumlah penawaran uang, jumlah pengeluaran pemerintah, nilai total ekspor, dan produk domestik bruto di Indonesia.

Data-data tersebut merupakan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari Bank Indonesia cabang Ujung Pandang, Biro Pusat Statistik cabang Ujung Pandang (BPS), Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan berbagai publikasi serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mendukung masalah penulisan ini. Setelah data tersebut diperoleh, untuk memudahkan pengolahan guna membuktikan hipotesis tersebut, maka digunakan komputer sebagai alat bantu.

2.5. Metode Analisis

Model analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan perkembangan penawaran uang, pengeluaran pemerintah, ekspor dan produk domestik bruto. Sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk melihat hubungan dan besarnya pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah, dan ekspor terhadap produk domestik bruto dengan pendekatan model analisa regresi berganda sebagai berikut :

$$Y^*_t = b_0 + b_1X^*_1t + b_2X^*_2t + b_3X^*_3t \quad 1) \dots (I)$$

Apabila dilakukan perhitungan regresi terhadap model tersebut di atas dengan menggunakan data yang dikumpulkan, maka akan timbul masalah multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas X^*_1 , X^*_2 dan X^*_3 . Akibat selanjutnya yang ditimbulkan oleh masalah multikolinearitas ini adalah koefisien determinasinya tinggi, tetapi terdapat satu atau lebih koefisien regresi yang tidak dapat diinterpretasikan atau tidak signifikan secara statistik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah multikolinearitas ganda tersebut adalah melakukan transformasi variabel-variabel sebagai berikut :

Apabila hubungan Y^* , X^*_1 , X^*_2 , dan X^*_3 berlaku seperti

1) J. Supranto, Ekonometrika, Buku II, Edisi I 1983, (Jakarta : LPFE-UI), Hal. 29

persamaan satu di atas, maka hubungan tersebut berlaku untuk waktu $t-1$. Dengan demikian akan diperoleh hubungan sebagai berikut :

$$Y^*_{t-1} = b + b_1 X^*_{1t-1} + b_2 X^*_{2t-1} + b_3 X^*_{3t-1} \quad 2) \dots (II)$$

Setelah dilakukan pengurangan persamaan II dari persamaan I, diperoleh hasil yang berikut :

$$Y^*_t - Y^*_{t-1} = b_0 + b_1 (X^*_{1t} - X^*_{1t-1}) + b_2 (X^*_{2t} - X^*_{2t-1}) + b_3 (X^*_{3t} - X^*_{3t-1}) \quad \text{atau}$$

$$Y_t = b_0 + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 X_{3t} \quad 3) \dots (III)$$

Kemudian model tersebut di atas dilogaritmakan dan hasilnya adalah :

$$\ln Y_t = \ln b_0 + b_1 \ln X_{1t} + b_2 \ln X_{2t} + b_3 \ln X_{3t}$$

dimana :

\ln = Logaritma Natural

Y = Produk domestik bruto

X_1 = Penawaran uang

X_2 = Pengeluaran pemerintah

X_3 = Ekspor

b_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien-koefisien regresi berganda

t = Periode waktu

Model analisa berganda tersebut akan dilengkapi dengan uji statistik t dan uji F , yang masing-masing kegunaannya adalah sebagai berikut :

2), 3), J. Supranto, Ekonometrika, Buku II, Edisi I 1983 (Jakarta : LPFE-UI), hal 29

persamaan satu di atas, maka hubungan tersebut berlaku untuk waktu $t-1$. Dengan demikian akan diperoleh hubungan sebagai berikut :

$$Y^*_{t-1} = b + b_1 X^*_{1t-1} + b_2 X^*_{2t-1} + b_3 X^*_{3t-1} \quad 2) \dots (II)$$

Setelah dilakukan pengurangan persamaan II dari persamaan I, diperoleh hasil yang berikut :

$$Y^*_t - Y^*_{t-1} = b_0 + b_1 (X^*_{1t} - X^*_{1t-1}) + b_2 (X^*_{2t} - X^*_{2t-1}) + b_3 (X^*_{3t} - X^*_{3t-1}) \quad \text{atau}$$

$$Y_t = b_0 + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 X_{3t} \quad 3) \dots (III)$$

Kemudian model tersebut di atas dilogaritmakan dan hasilnya adalah :

$$\ln Y_t = \ln b_0 + b_1 \ln X_{1t} + b_2 \ln X_{2t} + b_3 \ln X_{3t}$$

dimana :

\ln = Logaritma Natural

Y = Produk domestik bruto

X_1 = Penawaran uang

X_2 = Pengeluaran pemerintah

X_3 = Ekspor

b_0 = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien-koefisien regresi berganda

t = Periode waktu

Model analisa berganda tersebut akan dilengkapi dengan uji statistik t dan uji F , yang masing-masing kegunaannya adalah sebagai berikut :

2), 3), J. Supranto, Ekonometrika, Buku II, Edisi I 1963 (Jakarta : LPFE-UI), hal 29

- Uji statistik t

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing koefisien secara individual pada tingkat signifikansi 5 persen. Bila nilai t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel, maka masing-masing koefisien regresi dikatakan signifikan.

- Uji Statistik F

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien penawaran uang, pengeluaran pemerintah, dan ekspor secara simultan atau menyeluruh pada tingkat signifikansi 5 persen. Jika nilai F hitung lebih besar atau sama dengan nilai F tabel, maka koefisien regresi berganda dikatakan signifikan. Berarti terdapat hubungan dan pengaruh yang bermakna secara statistik antara penawaran uang, pengeluaran pemerintah, dan ekspor terhadap produk domestik bruto.

2.6. Batasan Variabel

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka digunakan beberapa variabel, yaitu :

2.6.1. Penawaran Uang

Menurut laporan Bank Indonesia penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di luar bank-bank dan kas negara yang dimiliki oleh masyarakat baik dalam bentuk uang tunai maupun tagihan terhadap bank-bank,

yang terdiri dari :

- Uang Kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang langsung berada di bawah kekuasaan masyarakat untuk menggunakannya.
- Uang Giral, yaitu seluruh nilai saldo rekening koran yang dimiliki oleh masyarakat dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek.
- Deposito Berjangka, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu.

Dari pengertian uang tadi, dalam penulisan skripsi ini pembahasannya dibatasi hanya pada uang kartal dan uang giral (M_1).

2.6.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kumpulan pos-pos yang menunjukkan konsumsi atau belanja negara, terdiri dari

- Pengeluaran Rutin, yaitu pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya terus menerus yang meliputi belanja pegawai/pensiun, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, dan lain-lain.
- Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya tidak terus

menerus dan ada akhirnya seperti kegiatan perbaikan dan pengembangan. Pengeluaran ini meliputi pembiayaan departemen/lembaga, pembiayaan daerah dan pembiayaan lainnya.

2.6.3. Ekspor

Ekspor adalah permintaan orang-orang luar negeri terhadap barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

2.6.4. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto adalah jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian dalam jangka/periode tertentu biasanya satu tahun.

2.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan selanjutnya, maka dianggap perlu untuk mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan serta hipotesis.

Bab kedua yaitu bab yang menjelaskan tentang metodologi yang mencakup kerangka analisis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, jenis dan sumber data,

metode analisis, dan batasan operasional variabel-variabel.

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan secara teoritis tentang penawaran uang, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengaruhnya terhadap produk domestik bruto.

Bab keempat merupakan bab pembahasan mengenai perkembangan penawaran uang dan komponen-komponennya, pengeluaran pemerintah dan komponen-komponennya, dan perkembangan ekspor Indonesia yang meliputi perkembangan ekspor migas dan non migas. Bagian terakhir dari bab ini membahas pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah, dan ekspor terhadap produk domestik bruto.

Bab kelima merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan judul pembahasan.

. BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3. 1 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional didefinisikan sebagai nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu:

- (i) Pendekatan produksi (production approach), (ii) pendekatan pendapatan (income approach) dan (iii) Pendekatan pengeluaran (expenditure approach) 1)

Dengan pendekatan produksi yang dihitung adalah nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada disuatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang asing atau warga negara itu sendiri. Hasil perhitungan ini dikenal dengan istilah produk domestik bruto. Adapun cara perhitungan adalah dengan menjumlahkan semua nilai dari barang dan jasa dikalikan dengan tingkat harga selama satu tahun. Dalam bentuk persamaan matematik dapat dinyatakan seperti berikut :

$$PDB = P_1 \cdot Q_1 + P_2 \cdot Q_2 + \dots P_n \cdot Q_n \quad 2)$$

Dimana :

PDB = Produk Domestik Bruto

1) Ace Partadireja, Perhitungan Pendapatan Nasional, Cetakan Keempat, Jakarta : LP3ES 1983, hal 33.

2) Soediyono R, Ekonomi Makro : Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, Edisi Keempat, Yogyakarta : Liberty 1985, hal. 23.

P = harga

Q = kuantitas barang dan jasa.

Dari segi pendekatan pendekatan yang dihitung adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendapatan faktor-faktor produksi tersebut dapat dibedakan menjadi upah, gaji, sewa dan laba. Dari sini pendapatan nasional dapat dihitung sebagai berikut :

$$Y = Y_w + Y_i + Y_r + Y_p \quad 3)$$

Dimana

Y = pendapatan nasional atas dasar biaya faktor

Y_w = upah dan gaji

Y_i = bunga yang diterima oleh pemilik modal

Y_r = sewa yang diterima oleh pemilik tanah

Y_p = laba yang diterima oleh pengusaha.

Selanjutnya dari segi pengeluaran yang dihitung adalah seluruh pengeluaran yang terdiri dari konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Dalam persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M) \quad 4)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti

3) Soediyono R, Ibid, Hal. 22

4) Soediyono R, Ibid, Hal. 20

bahwa pendapatan nasional mempunyai nilai yang berbeda-beda bergantung dari pendekatan mana yang digunakan.

Berkat kemajuan perhubungan antar negara, banyak perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan Indonesia ada yang beroperasi di luar negeri. Sehubungan dengan itu, perlu dibedakan pengertian antara produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Dalam produk nasional bruto yang dihitung adalah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh warga negara dan milik warga negara Indonesia, sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dan dimiliki oleh warga negara asing tidak diperhitungkan. Sebaliknya barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dimasukkan dalam produk nasional bruto.

Produksi barang-barang dan jasa-jasa suatu negara (Indonesia) ditambah dengan produksi barang-barang dan jasa-jasa orang-orang dan perusahaan-perusahaan asing disebut produk domestik bruto (PDB). Selisih antara produk domestik bruto dengan produk nasional bruto (PNB) adalah pembayaran ke luar negeri dikurangi pembayaran dari luar negeri, yang dalam istilah Biro Pusat Statistik (BPS) disebut "Pendapatan Netto terhadap luar negeri dari faktor produksi" (Net factor income to abroad). Jika PDB suatu negara lebih besar dari PNB, maka penanaman modal luar negeri di negara itu lebih besar dari penanaman

modal negara itu di luar negeri. Sebaliknya, apabila PDB suatu negara lebih kecil dari PNB, maka lebih banyak aliran modal keluar daripada aliran modal yang masuk ke dalam negara itu.

3.2 Teori Moneter

3.2.1 Teori kuantitas

Teori kuantitas yang dimaksud adalah teori kuantitas tradisional. Teori kuantitas uang ini memberikan penjelasan tentang peranan uang secara makro dalam perekonomian. Pada dasarnya teori kuantitas tradisional dapat dikelompokkan dalam tiga versi (pendekatan) yaitu :

- (1) Pendekatan transaksi (transaction velocity approach, (ii) pendekatan keseimbangan tunai (cash balance), dan (iii) pendekatan pendapatan⁵⁾

(i) Pendekatan Transaksi

Pendekatan transaksi ini diperkenalkan oleh Irving Fisher dalam bukunya "The Purchasing Power of Money" yang terbit pada tahun 1911. Pendekatan ini menggambarkan bahwa dalam setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Dalam suatu periode tertentu nilai dari barang dan jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang dan

⁵⁾ Sri Mulyani Indrawati, Teori Moneter, LPFE-UI, Hal.14

jasa yang dijual. Nilai barang dan jasa yang dijual sama dengan volume transaksi (T) dikalikan dengan harga rata-rata barang tersebut (P). Sisi lain menggambarkan bahwa penawaran uang (M) dikali dengan rata-rata perputaran uang (V) pada periode tersebut. Dengan demikian dapat dirumuskan dalam suatu persamaan sebagai berikut :

$$M.V = P.T$$

(ii) Pendekatan Cash - Balance

Pendekatan Cash - Balance dikembangkan oleh para ahli ekonomi dari Cambridge. Seperti halnya teori Irving Fisher, juga berpangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar. Karena itu baik teori Irving Fisher maupun teori Cambridge melihat kebutuhan uang dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi.

Dalam merumuskan teori Cambridge diadakan penyederhanaan terhadap variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan akan uang dianggap konstan dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek teori Cambridge menganggap bahwa jumlah kekayaan, volume transaksi, dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang proporsional dan konstan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya mereka merumuskan teori uang dalam bentuk yang tidak jauh beda dengan teori Irving Fisher, yaitu :

$$M_d = k PT$$

Dalam posisi keseimbangan permintaan sama dengan penawaran uang sehingga,

$$M_s = M_d$$

atau

$$M_s = k PT$$

dimana M_d = permintaan uang

M_s = penawaran uang

T = transaksi

k = angka pecahan

p = tingkat harga

Dalam analisis ekonomi ada perbedaan yang menyolok antara dua pendekatan tersebut. Pendekatan transaksi menitikberatkan pada alasan masyarakat membelanjakan uang. Sedangkan pendekatan cash-balance bertumpu pada alasan masyarakat memegang uang.

(iii) Pendekatan Pendapatan

Pada dasarnya pendekatan pendapatan ini lahir karena kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pendekatan transaksi. Pendekatan pendapatan ini mengganti konsep transaksi dengan konsep pendapatan riil. Dalam pendekatan ini terdapat variabel-variabel :

$$M = k Y$$

dimana $Y = P.y$, sehingga,

$$M = k P.y$$

dimana,

M = penawaran uang

k = porsi pendapatan nominal yang dipegang oleh masyarakat dalam bentuk uang

Y = pendapatan nasional dalam nilai nominal

p = indeks harga

y = pendapatan nasional dalam nilai riil

Dengan demikian pendekatan pendapatan memiliki konsep yang berbeda dengan pendekatan transaksi dalam hal peranan uang. Dalam pendekatan transaksi, uang adalah alat tukar. Sedangkan dalam pendekatan pendapatan uang lebih dianggap sebagai sesuatu yang harus dipegang.

3.2.2 Teori Keynes

Teori Keynes menitikberatkan pada usaha-usaha untuk menanggulangi situasi depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Teori ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul "The General Theory of Employment, Interest and Money" yang terbit pada tahun 1936.

Penerbitan "The General Theory" ini merupakan transisi dari suatu teori moneter tentang harga-harga ke dalam suatu moneter tentang out-put. Dalam transisi ini Keynes tidak hanya berusaha untuk mengintegrasikan teori dan teori nilai akan tetapi juga memasukkan teori tentang tingkat bunga ke dalam teori moneter yang merupakan

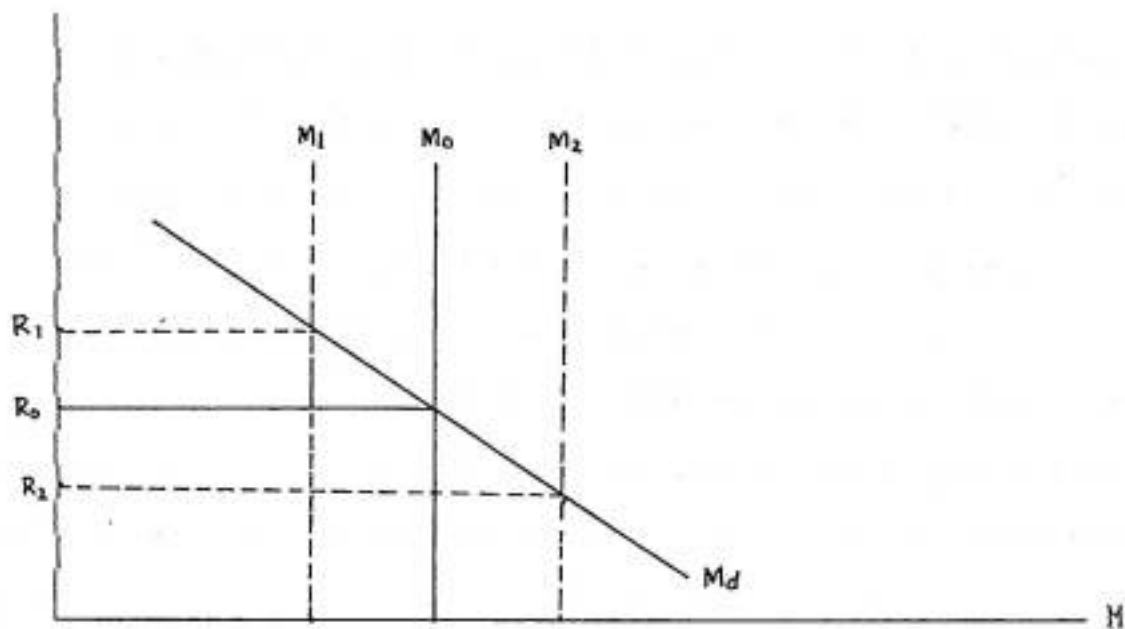
perantara antara sektor moneter dan sektor riil secara terpisah dan kemudian menggabungkannya ke dalam suatu teori tunggal tentang ekonomi secara keseluruhan, dimana masing-masing sektor saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari sektor moneter, ekonomi akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran uang sama dengan permintaan uang. Dalam menetapkan jumlah penawaran uang otoritas moneter harus menyesuaikan dengan permintaan uang. Menurut analisis teori Keynes terdapat tiga faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Motif transaksi adalah untuk melakukan transaksi guna memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Motif berjaga-jaga dimaksudkan bahwa masyarakat meminta sejumlah uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga. Sedangkan motif spekulasi adalah permintaan uang untuk melakukan spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya surat obligasi. Para spekulan membeli surat obligasi pada saat harganya murah dan menjualnya kembali pada saat harganya mahal. Dengan cara begini, spekulan mendapat keuntungan.

Dari segi penawaran uang, menurut Keynes bahwa pada setiap saat terdapat sejumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jika jumlah penawaran yang berubah, maka perubahan ini akan berpengaruh pada tingkat bunga. Untuk lebih jelasnya, perubahan tingkat bunga tersebut dapat

dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.1 Hubungan Penawaran Uang dan Tingkat Bunga
R



Sedangkan pengaruh perubahan jumlah uang beredar (penawaran uang) terhadap sektor riil dikemukakan sebagai berikut :

Apabila terjadi penambahan penawaran uang, masyarakat akan membelanjakan kelebihan uang kasnya untuk membeli surat-surat berharga (obligasi). Selanjutnya harga surat berharga akan naik dan tingkat bunga akan turun. Jika turunnya tingkat bunga bisa mendorong pengusaha untuk meminjam dana untuk melakukan investasi atau mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa, maka pendapatan nasional (PDB) akan naik. ⁶⁾

Jadi perubahan jumlah uang beredar dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional (PDB), jika didahului dengan perubahan tingkat bunga, investasi dan konsum-

⁶⁾ Glan A. Iswara dan Nopirin, Teori Moneter, Yogyakarta : BPFE 1986, Hal. 5

si masyarakat.

3.2.3 Teori Moneteris

Teori moneteris atau teori kuantitas modern dirintis oleh Milton Friedman. sesuai dengan namanya, kaum moneteris menekankan pada peranan uang dalam menganalisis perubahan-perubahan jangka pendek dalam pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Para pengikut moneteris menekankan bahwa perubahan uang akan berpengaruh terhadap agregat spending dan pendapatan nasional. Jika penawaran uang diperbesar dalam masa resesi, maka peningkatan permintaan agregat akan meningkatkan employment dan output riil. Sebaliknya jika kondisi ekonomi sudah mendekati full employment, maka peningkatan pendapatan nasional akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Dengan demikian antara penawaran uang dengan pendapatan nasional terdapat hubungan langsung dan dapat dipercaya. menurut kaum moneteris :

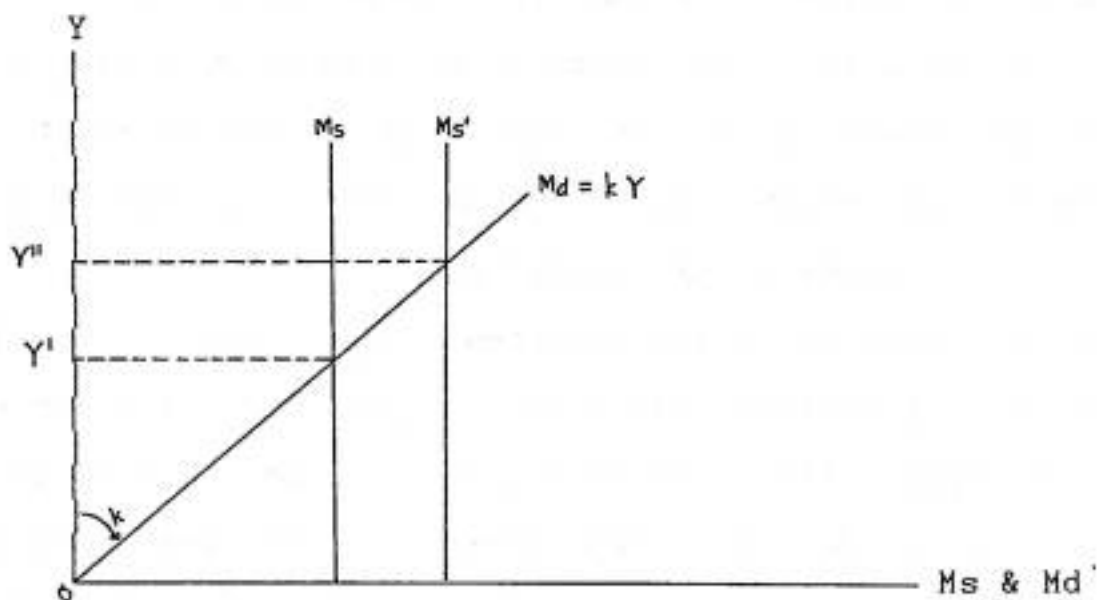
"... antara penawaran uang dan pendapatan nasional terdapat hubungan yang langsung dan dapat dipercaya. Hubungan ini terjadi melalui monetary velocity yang dapat diperkirakan besarnya. Oleh karena itu suatu perubahan penawaran uang akan mempengaruhi agregat spending dan pendapatan nasional (PDB).⁷⁾

Suatu penambahan penawaran uang akan menaikkan

7) Glan A. Iswara dan Nopirin, Ibid, Hal 2

pendapatan nasional, karena suatu kelebihan penawaran uang akan membuat masyarakat membelanjakan uangnya dan terus berbelanja sampai permintaan akan uang sama besarnya dengan penawaran uang. Dan pendapatan nasional akan terus meningkat sampai semua tambahan penawaran uang terserap oleh permintaan uang. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.2 Hubungan Penawaran Uang dengan Pendapatan Nasional



3.2.4 Transmisi Moneter Menurut Keynes dan Moneteris

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu perbedaan pendapat antara Keynesian dan Moneteris adalah mengenai jalur transmisi moneter ke sektor riil.

Jalur transmisi moneter ke sektor riil adalah jalur yang harus dilalui oleh bekerjanya kebijaksanaan moneter sampai berpengaruh terhadap sektor riil.

Perbedaan pendapat ini diawali dengan perbedaan pendapat dari sisi lain, yaitu tingkat bunga. Menurut Keynesian tingkat bunga yang berlaku adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Setiap terjadi gangguan di sektor moneter, maka yang pertama-tama yang dipengaruhi adalah tingkat bunga. Situasi selanjutnya sebagai akibat perubahan tingkat bunga ini adalah terjadinya perubahan pada sektor riil. Keadaan inilah yang dimaksud oleh aliran Keynesian sebagai jalur transmisi tidak langsung.

Jalur transmisi yang tidak langsung ini dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan dalam penawaran uang, maka tingkat bunga di pasar akan menurun, atau sebaliknya, jika terjadi penurunan penawaran uang, maka tingkat bunga akan meningkat. Perubahan tingkat ini akan mengakibatkan perubahan dalam sektor riil. Sedangkan jalur transmisi moneter ke riil menurut aliran moneteris adalah jalur langsung, artinya apabila terjadi gangguan di sektor moneter, maka berpengaruh langsung terhadap sektor riil tanpa didahului dengan perubahan tingkat bunga. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Milton Friedman yang membedakan antara uang dan kredit sebagai dua sisi dari mata uang yang berbeda. Sehingga aliran ini berpendapat bahwa tingkat bunga hanyalah merupakan harga

kredit dan bukan merupakan harga uang. Jadi jelaslah perbedaan antara pandang dari Keynes dan Moneteris tentang jalur transmisi moneter ke sektor riil.

3.3 Pengeluaran Pemerintah

3.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Barang dan jasa tersebut merupakan hasil proses produksi tahun yang bersangkutan. Oleh sebab itu tidak semua sisi pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Hanya pos-pos yang menyangkut pembelian barang dan jasa hasil produksi tahun yang bersangkutan yang dianggap sebagai pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah menurut pengertian di atas adalah pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan komponen pendapatan nasional (PDB).

Disamping pengeluaran pemerintah yang disebut government expenditure, dikenal pula pengeluaran pemerintah yang disebut government transfer. Government expenditure meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasa, misalnya pembayaran gaji

pegawai negeri termasuk pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk. Sedangkan government transfer merupakan pengeluaran dimana pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung misalnya sumbangan untuk korban bencana alam, sumbangan kepada penganggur, uang pensiun pegawai negeri, subsidi kepada perusahaan, dan pemberian beasiswa kepada pelajar.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi antara lain :

- a. Pengeluaran yang merupakan investasi yang akan menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan-kesejahteraan kepada masyarakat.
- c. Pengeluaran yang menyediakan dan memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.
- d. Pengeluaran yang merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

Berdasarkan penilaian tersebut, Soeparmoko membedakan bermacam-macam pengeluaran pemerintah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang self-liquidating sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang-barang atau jasa-jasa yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

- b. Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran untuk mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak maka akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, dan obyek pariwisata. Dalam hal ini dapat juga meningkatkan pendapatan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan orang yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, maka kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa akan datang pada waktu usia lanjut akan lebih besar.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penggolongan pengeluaran pemerintah terbagi menjadi pos-pos penggunaan lancar dan penggunaan kapital.

Pos penggunaan lancar terutama berasal dari pengeluaran rutin pemerintah. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang, pembiayaan cadangan pangan, dan lain-lain. Pengeluaran ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pos-pos penggunaan kapital terutama berasal dari pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan terdiri dari program pembangunan yang meliputi pembiayaan departemen/lembaga, pembiayaan pembangunan daerah dan bantuan proyek yang merupakan penyertaan modal pemerintah. Pengeluaran ini dimaksudkan untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan-jalan, sekolah-sekolah, balai pengobatan dan sebagainya.

Jadi pada hakekatnya pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya terus-menerus, sedangkan pengeluaran pembangunan dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya tidak terus menerus.

3.3.2 Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pembangunan

Ekonomi

Pengeluaran pemerintah dalam perekonomian di negara-negara sedang berkembang relatif besar dan selalu meningkat. Oleh sebab itu, pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran tersebut dapat menciptakan

berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang perusahaan swasta enggan menanamkan modalnya di bidang-bidang yang tidak cepat menghasilkan. Dalam keadaan demikian pertumbuhan ekonomi yang cepat hanya dimungkinkan melalui pengeluaran pemerintah yang terutama ditujukan untuk menciptakan infra struktur yang diperlukan bagi kemajuan.

Peranan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, mendorong inisiatif dan usaha swasta dan mewujudkan keseimbangan regional di dalam perekonomian.

Pengeluaran pemerintah untuk pendirian industri berat dan industri barang-barang pokok pada tahap-tahap awal akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam perekonomian. Selanjutnya pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan untuk meningkatkan penawaran barang-barang konsumsi dengan cara men-

dorong pendirian dan perluasan sektor industri kecil yang juga dapat memberikan kesempatan kerja yang cukup. Laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan hanya apabila pengeluaran pemerintah memenuhi tujuan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

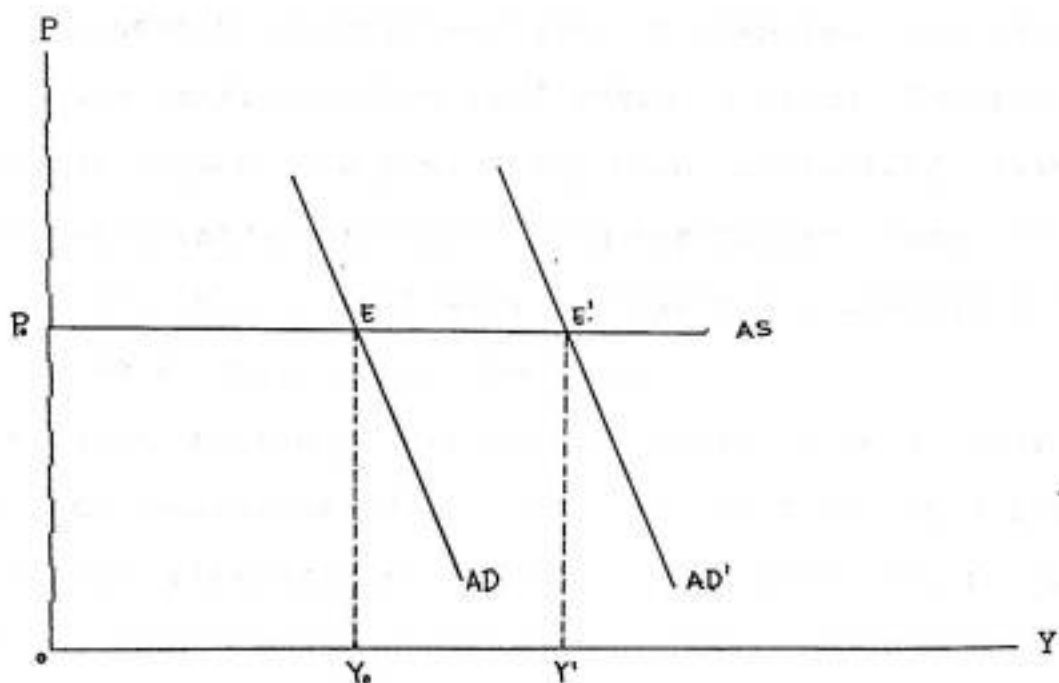
3.3.3 Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Nasional

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pemerintah dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik. Kecenderungan peningkatan pengeluaran pemerintah yang terus menerus memberikan konsekwensi perlunya diciptakan suatu pedoman pelaksanaan pengeluaran pemerintah sehingga hasil yang optimum dapat dicapai terutama dalam pencapaian sasaran dari pengeluaran pemerintah itu seperti meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan produksi nasional bruto.

Aliran Keynes berpendapat bahwa kenaikan dalam pengeluaran pemerintah akan menaikkan out-put (GNP). Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa berapapun jumlah barang-barang yang diminta, akan ditawarkan dengan tingkat harga yang ada. Ini memberikan implikasi bahwa kurva penawaran agregat adalah horisontal seperti yang

ditunjukkan dalam gambar 3.3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan agregat demand dari AD ke AD' yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan nasional dari Y ke Y', tetapi tingkat harga tidak berubah sebab kurva penawaran agregat adalah elastis sempurna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 3.3 sebagai berikut :

Gambar 3.3 Permintaan dan Penawaran Agregat
Menurut Asumsi Keynesian



Dalam kasus moneteris-klasik, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan pendesakan penuh terhadap investasi. Hal ini disebabkan kaum klasik

menganggap bahwa permintaan terhadap uang tidak elastis terhadap tingkat bunga dan akibatnya kurva LM berbentuk vertikal.

Namun kebanyakan ekonom-ekonom makro cenderung untuk berada di tengah-tengah yaitu percaya bahwa kurva IS dan LM mempunyai kemiringan. Dengan demikian kebijaksanaan moneter (penawaran uang) dan kebijaksanaan fiskal (pengeluaran pemerintah) dapat mempengaruhi pendapatan nasional.

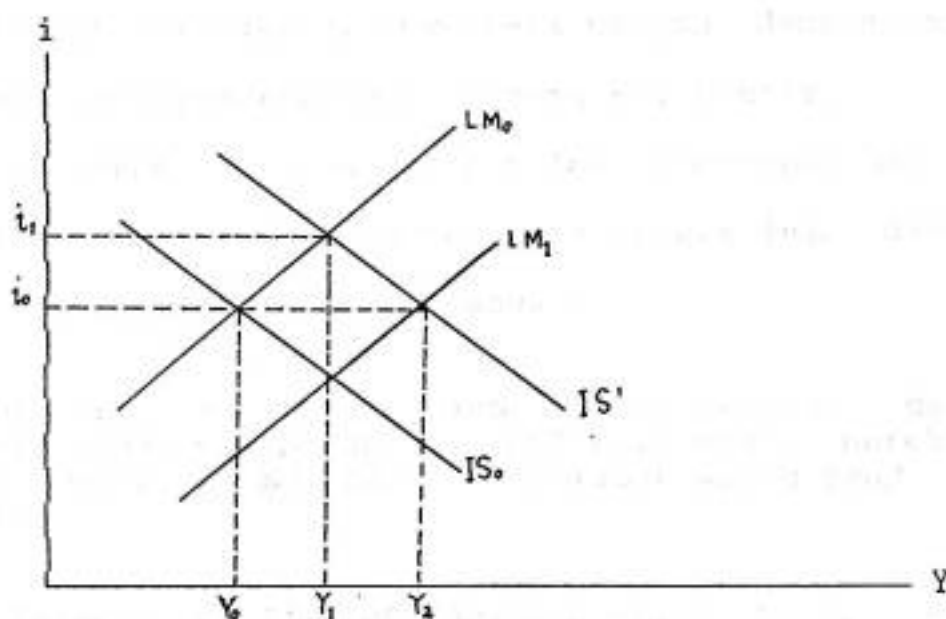
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh positif dan dapat juga berpengaruh negatif terhadap pendapatan nasional (PDB). Bila ditinjau dari segi makro ekonomi besarnya pengeluaran pemerintah yang diinginkan bergantung pada (i) kebutuhan untuk merangsang atau menciutkan perekonomian (ii) pengaruh relatif dari kebijaksanaan moneter dan fiskal untuk merangsang perekonomian.

Masalah bauran kebijaksanaan moneter-fiskal didasarkan pada penggunaan kedua kebijaksanaan tersebut dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pendapatan nasional maupun komposisi pendapatan nasional. Dengan mengubah-ubah pengeluaran pemerintah dan penawaran uang, maka pemerintah dapat mengubah bagian daripada out-put potensial yang diperuntukkan bagi investasi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah.

Bila perekonomian berada dalam kondisi yang kurang

stabil dimana masih terdapat pengangguran, maka pemerintah dapat memperluas out-put (PDB) tanpa menaikkan suku bunga dan pendesakan terhadap investasi swasta. Hal ini bisa terjadi apabila otoritas moneter dapat menyesuaikan pengeluaran pemerintah dengan peningkatan penawaran uang, seperti terlihat pada gambar 3.4

Gambar 3.4 Penyesuaian Moneter dan Perluasan Fiskal



Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke IS' dan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi suku bunga akan meningkat dari i_0 ke i_1 . Untuk mencegah hal ini, maka bank sentral menaikkan penawaran uang sehingga kurva LM bergeser ke LM' dan memotong IS' di Y_2 dan i_0 . Dengan demikian pengeluaran pemerintah telah meningkatkan pendapatan nasional tanpa menaikkan tingkat bunga. Inilah hasil kombinasi antara kebijaksanaan moneter (penawaran uang)

dengan kebijaksanaan fiskal (pengeluaran pemerintah).

3.4 Ekspor dan Pembangunan Ekonomi

Negara-negara sedang berkembang memiliki beberapa kelemahan yang mendasar dalam bidang ekonomi. Kelemahan tersebut menyangkut rendahnya tingkat pendapatan, produksi, konsumsi tabungan, investasi maupun dana-dana yang tersedia bagi perkembangan ekonomi selanjutnya.

Beberapa batasan yang telah dicetuskan di dalam merumuskan pembangunan ekonomi ini antara lain dikemukakan oleh Meier dan Baldwin bahwa :

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. ⁸⁾

Peranan penting pembangunan dalam bidang ekonomi suatu negara apabila dihubungkan dengan perdagangan luar negerinya dapat terlihat sebagai suatu hubungan yang tidak dapat dilepaspisahkan. Dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi, sektor produksi akan meningkatkan produksinya. Pada suatu saat akan terjadi over-produksi karena tingkat konsumsi dalam negeri tidak dapat menyerap seluruh hasil-hasil produksi. Ini berarti diperlukan dae-

8) G.M Meier dan R.E Baldwin, Pembangunan Ekonomi, Bharatara, Jakarta 1965, Hal. 6

rah pemasaran yang lebih luas dari batas-batas negara. Dalam kaitan ini ekspor menjadi sangat penting adanya.

Dengan adanya ekspor maka kemungkinan untuk mengimpor barang-barang yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri dapat dilakukan, karena dana untuk itu cukup tersedia. Disamping itu dengan melakukan ekspor sumber penerimaan negara menjadi bertambah berupa devisa maupun pungutan-pungutan lain yang diperoleh dari sektor ini. Bertambahnya dana tersebut dalam pendapatan nasional menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tabungan dan investasi secara lebih baik dibandingkan dengan sebelum melakukan ekspor.

BAB IV
PRODUK DOMESTIK BRUTO, PENAWARAN UANG,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN EKSPOR INDONESIA

4.1 Produk Domestik Bruto

Secara keseluruhan, hasil-hasil pembangunan tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari produk domestik bruto (PDB), baik dihitung atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan. Perhitungan produk domestik bruto (PDB), yang semula didasarkan pada harga konstan 1973 diubah dengan perhitungan atas dasar harga konstan 1983. Sepuluh tahun kemudian perhitungan produk domestik bruto didasarkan pada harga konstan 1993. Namun untuk melihat perkembangan produk domestik bruto dalam penulisan ini, dihitung atas dasar tahun 1983. Perkembangan produk domestik bruto dipengaruhi oleh tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri, maupun pelbagai faktor yang mewarnai keadaan ekonomi, pola perdagangan dan situasi moneter.

Produk domestik bruto sebagai tolok ukur perkembangan ekonomi yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun, telah menunjukkan perkembangan yang sangat mengesankan. Dalam kurun waktu 1987-1997, produk domestik bruto menurut harga berlaku, mengalami kenaikan dari Rp. 124 816,9 miliar pada tahun 1987 menjadi Rp. 624 337,1 miliar pada tahun 1997 atau telah mengalami peningkatan

rata-rata 17,5 persen per tahun. Sedangkan produk domestik bruto diukur menurut harga konstan tahun 1983, tingkat pertumbuhan rata-rata dalam periode tersebut adalah sebesar 6,7 persen per tahun yaitu sebesar Rp. 94 517,8 miliar dalam tahun 1987 menjadi Rp. 295 027, 45 miliar dalam tahun 1997.

Tabel 4.1

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku, Harga konstan Tahun 1983 dan 1993
Periode Tahun 1987-1997
(Miliar Rupiah)

Tahun	PDBb	PDBk
1987*	124 816,9	94 517,8
1988*	142 020,3	99 981,4
1989*	166 329,5	107 522,8
1990*	196 919,2	115 119,1
1991*	227 162,8	122 705,0
1992*	259 884,5	131 184,8
1993*	302 017,8	139 707,1
1994**	382 219,7	354 640,8
1995**	452 380,9	383 767,8
1996**	532 630,8	414 418,9
1997**	624 337,1	433 685,2

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

PDBb = PDB atas dasar harga berlaku
PDBk = PDB atas dasar harga konstan
* = Harga konstan tahun 1983
** = Harga konstan tahun 1993

Seperti pada tabel 4.1 perhitungan produk domestik bruto tahun 1994-1997, mengalami perugahan yang sangat mendasar. Perubahan ini sebagai konsekuensi logis dari

adanya perubahan tahun dasar dari tahun 1983 ke tahun 1993.

Penggantian tahun dasar yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik yang merupakan reklasifikasi sektor pada tahun dasar yang lama (1983) ke tahun dasar yang baru (1993). Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan adalah sebelas sektor pada tahun dasar yang lama sedangkan pada tahun dasar yang baru digunakan sembilan sektor.

Adapun metode yang pendekatan digunakan dalam perubahan tahun dasar adalah :

$$PDB_{HKx} = \frac{100}{IHK_x} PDB_{HBx}$$

dimana:

PDB = Produk domestik bruto

HK = Harga konstan

HB = Harga berlaku

IHK = Indeks harga konsumen

x = Tahun tertentu

Berdasarkan pada metode pendekatan tadi, maka PDB selama periode tahun 1987-1997 atas dasar harga konstan tahun 1983 dapat dihitung dan hasilnya seperti pada tabel 4.2. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1989 yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar 7,5 persen. Laju pertumbuhan ini jauh lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebe-

lumnya sebesar 5,8 persen.

Tabel 4.2

PDB Atas Harga Konstan tahun 1983

(Miliar Rupiah)

Tahun	PDB
1987	94 517,8
1988	99 981,4
1989	107 522,8
1990	115 119,1
1991	122 705,0
1992	131 184,8
1993	139 707,1
1994	234 246,0
1995	254 432,5
1996	280 839,8
1997	295 027,5

Sumber : Diolah dari tabel
4.1

Untuk memahami pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1989 secara rinci, maka perlu dilihat masing-masing perkembangan sektornya. Dari tabel 4.3, tampak bahwa sektor pertanian mencatat peningkatan riil tahun 1989 sebesar 3,3 persen yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,9 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini antara lain disebabkan rendahnya peningkatan nilai tambah subsektor tanaman bahan makanan atas dasar harga konstan sebesar 3,6 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 4,5 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan riil sebesar 2,89 persen,

pada tahun 1989 mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen, disebabkan terutama karena subsektor minyak dan gas bumi mengalami kenaikan sebesar 48 persen.

Dalam tahun yang sama industri pengolahan telah tumbuh cukup mengesankan yaitu sebesar 9,2 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 11,9 persen tahun sebelumnya, dan sedikit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata yang direncanakan selama Pelita IV sebesar 9,5 persen. Pertumbuhan 9,2 persen itu disebabkan oleh peningkatan industri pengolahan non migas sebesar 11,6 persen, sedang pengilangan minyak bumi hanya meningkat sebesar 0,9 persen, dan subsektor pengilangan gas alam cair naik sebesar 1,9 persen.

Lima sektor mempunyai laju pertumbuhan riil yang cukup mengesankan, yaitu ; (a) listrik, gas dan air, (b) bangunan, (c) perdagangan, hotel dan restoran (d) pengangkutan dan komunikasi dan (e) bank dan lembaga keuangan lainnya, masing-masing sebesar 12,2 persen, 11,2 persen, 10,7 persen, 11,5 persen, dan 14,4 persen. Tiga sektor lainnya yaitu sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan dan jasa-jasa masing-masing di bawah tujuh persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1991, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB atas dasar harga konstan 1983, adalah sebesar 6,60 persen (tabel 4.3). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan

tahun sebelumnya sebesar 7,24 persen dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata selama Pelita IV sebesar 5,3 persen per tahun.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1991, maka perlu dilihat perkembangan masing-masing sektornya. Dari tabel 4.3 dapat diketahui sektor pertanian mencatat peningkatan riil sebesar 1,60 persen, yang berarti lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,00 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini antara lain disebabkan negatifnya peningkatan nilai tambah subsektor tanaman bahan makanan atas dasar harga konstan sebesar -0,58 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 0,52 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan riil sebesar 5,21 persen pada tahun 1991 mengalami kenaikan sebesar 10,2 persen, dimana subsektor minyak dan gas bumi mengalami kenaikan sebesar 8,46 persen. Perlu diketahui bahwa dalam perhitungan nilai tambah bruto sektor ini, telah digunakan angka produksi aktual minyak mentah tahun 1983-1991, sedangkan pada perhitungan PDB seri lama digunakan angka produksi quota.

Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 10,1 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,5 persen. Pertumbuhan 10,1 persen

ini disebabkan karena industri pengolahan non migas meningkat 10,56 persen, sedang pengilangan minyak bumi meningkat hanya 3,13 persen dan subsektor pengilangan gas alam cair naik sebesar 8,39 persen.

Lima sektor mempunyai laju pertumbuhan riil cukup mengesankan yaitu (a) listrik, gas, dan air naik sebesar 16,14 persen, (b) bangunan 11,25 persen, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya 13,10 persen, (d) pengangkutan dan komunikasi 7,88 persen, (e) perdagangan, hotel dan restoran 5,4 persen. Tiga sektor lainnya pemerintahan dan pertahanan, sewa rumah dan jasa-jasa, masing-masing mempunyai kenaikan dibawah 6 persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 1993, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB atas dasar harga konstan 1983, adalah sebesar 6,50 persen (tabel 4.3). Laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,46 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata selama Pelita V sebesar 6,92 persen per tahun.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi nasional 1993, maka perlu dilihat perkembangan dari masing-masing sektornya. Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sektor pertanian mencatat peningkatan riil tahun 1993 sebesar 1,42 persen, yang berarti lebih rendah peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,65 persen. Turunnya laju pertumbuhan ini disebabkan penurun-

an yang tajam dari nilai tambah subsektor tanaman bahan makanan atas harga konstan sebesar 1,18 persen, tidak seperti tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan tajam sebesar 7,73 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 1,86 persen, dan tahun 1993 mengalami kenaikan riil sebesar 2,18 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang tajam dari produksi batu bara dan biji bouksit masing-masing 19,31 persen dan 64,33 persen.

Pertumbuhan sektor industri telah berpengaruh positif pada perkembangan sektor-sektor lainnya. Secara keseluruhan sektor-sektor di luar pertanian, pertambangan dan industri tahun 1993 meningkat rata-rata 8,59 persen.

Lima sektor mempunyai laju pertumbuhan riil yang cukup mengesankan yaitu; (a) listrik, gas, dan air minum naik sebesar 10,14 persen, (b) bangunan 12,15 persen, (c) perdagangan, hotel dan restoran 8,76 persen (d) pengangkutan dan jasa-jasa 8,88 persen (e) bank dan lembaga keuangan lainnya 13,01 persen. Sementara sektor pemerintahan dan pertahanan dan sewa rumah yang mempunyai laju pertumbuhan kurang dari enam persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh PDB atas dasar harga konstan 1993 mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 adalah 7,48 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding

dengan pertumbuhan rata-rata Pelita V sebesar 6,92 persen per tahun (dihitung atas harga konstan tahun 1983).

Pertumbuhan ini merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu yang lalu, yang antara lain promosi investasi swasta yang cukup tinggi dan pengaruh paket deregulasi Oktober 1993 yang antara lain memperlancar perizinan di bidang penanaman modal. Secara sektoral, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, di atas 10 persen, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, dan bangunan. Tingginya tingkat pertumbuhan ini akibat permintaan domestik yang cukup kuat. Sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh lebih moderat yaitu di atas lima persen, kecuali sektor jasa-jasa dan sektor pertanian masing-masing 2,77 persen dan 0,55 persen.

Ekonomi Indonesia di tahun 1995 tumbuh sebesar 8,2 persen, yang jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari pengaruh musim dan kebijakan pemerintah. Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi tahun 1995 adalah karena meningkatnya sektor pertanian, yang meningkat cukup pesat dari 0,56 persen di tahun 1994 menjadi 4,18 persen di tahun 1995, karena cuaca baik. Pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi sedikit menurun, yaitu sebesar 7,82 persen, namun masih di atas target. Penurunan ini sebagai akibat

dari pengaruh kebijakan keuangan yang diambil pemerintah yang diarahkan pada pengurangan pengeluaran masyarakat, karena defisit transaksi berjalan kian membesar. Besarnya defisit transaksi berjalan ini, dikarenakan besarnya defisit di sektor jasa-jasa, yang mencapai tiga kali lebih dibanding surplus perdagangan. Penyumbang utamanya antara lain karena besarnya biaya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, pada tahun 1996 mencapai sekitar 5 Trilyun rupiah. Pengeluaran jauh melebihi penerimaan TKI yang bekerja di luar negeri yaitu sekitar 500 miliar rupiah. Padahal jumlah TKI sudah mencapai 400 000 orang, sedangkan TKA di Indonesia berjumlah 57 ribu orang.

Secara umum, menurut sektoral pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, kecuali sektor industri dan jasa-jasa. Sektor industri pada tahun 1996 tumbuh sebesar 11,66 persen sedikit meningkat dibanding pertumbuhan pada tahun 1995, yaitu sebesar 10,83 persen. Sementara sektor jasa-jasa meningkat sebesar 3,33 persen dibanding 3,27 persen di tahun 1995. Untuk melihat laju pertumbuhan PDB selama periode tahun 1987-1997 dengan jelas, lihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
 Laju Pertumbuhan PDB Tahun 1987-1997
 Atas Dasar Harga Konstan tahun 1983
 (Dalam Persentase, Tahun Sebelumnya = 100)

LU	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	2,14	4,90	3,32	2,00	1,60	6,65	1,42	0,56	4,18	1,89	
2	0,35	-2,89	4,85	5,21	10,2	-1,86	2,18	5,60	6,74	5,50	
3	10,6	11,9	9,20	12,5	10,1	9,68	9,35	12,4	10,8	11,7	
4	15,1	10,9	12,2	17,9	16,1	10,1	10,2	12,5	15,5	12,6	
5	4,21	9,50	11,8	13,5	11,3	10,8	12,2	14,9	12,9	12,4	
6	7,15	9,06	10,7	7,10	5,43	7,32	8,76	7,61	7,75	7,63	
7	5,79	5,53	11,5	9,57	7,88	9,98	8,89	8,34	9,39	8,56	
8	5,06	2,54	14,4	14,1	13,1	13,2	13,0	10,2	11,2	10,5	
9	4,27	4,08	4,18	4,21	4,03	4,15	4,98				
10	7,34	7,68	5,86	4,60	3,06	2,96	2,03				
11	3,74	4,31	6,19	5,01	5,24	7,35	8,88	2,77	3,27	3,33	
PDB	4,93	5,78	7,46	7,24	6,60	6,46	6,50	7,48	8,21	7,82	5,03

Sumber : Pendapatan Nasional Indonesia, BPS. Sul-SEL.

Keterangan :

LU = Lapangan Usaha

1 = Pertanian Peternakan dan Kehutanan

2 = Pertambangan dan Penggalian

3 = Industri Pengolahan

4 = Listrik, Gas, dan Air Minum

5 = Bangunan

6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran

7 = Pengangkutan dan Komunikasi

8 = Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

9 = Sewa Rumah

10 = Pemerintahan dan Pertahanan

11 = Jasa-jasa

4.2 Penawaran Uang

Perkembangan jumlah uang beredar (money supply) dalam suatu periode cenderung untuk mempengaruhi laju inflasi yang terjadi di suatu negara. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan jumlah uang beredar (penawaran uang) di masyarakat. Perkembangan jumlah uang beredar, sangat tergantung pada kepentingan dan kebutuhan dari penggunaan uang oleh masyarakat. Selain itu, sektor swasta juga mempunyai kontribusi besar terhadap jumlah uang beredar, melalui berbagai pengeluaran untuk usahanya.

Oleh karena itu, peningkatan jumlah barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat diimbangi dengan peningkatan jumlah uang beredar. Apabila keseimbangan seperti ini tidak tercapai, kenaikan harga-harga komoditi di pasaran akan cenderung terjadi. Berdasarkan hal itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Perkembangan jumlah uang beredar (money supply) di Indonesia selama periode pengamatan yaitu tahun 1987-1997, memperlihatkan fenomena, dimana pada tahun 1987, uang kartal sebanyak Rp. 5 782 miliar, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uang giral, yaitu sebanyak Rp. 6 903 miliar dari posisi jumlah uang beredar (M_1) sebesar Rp. 12 685 miliar. Pada tahun 1988, perkembangan uang kartal sebesar 43,4 persen, sedikit

lebih rendah dari tahun sebelumnya, sementara perkembangan uang giral meningkat menjadi 56,6 persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan uang giral tahun sebelumnya. Keadaan yang serupa, pada tahun 1989 perkembangan uang kartal mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 36,9 persen dan uang giral perkembangannya jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,1 persen. Perkembangan ini memberikan indikasi meningkatnya peranan uang giral sebagai alat pembayaran pada transaksi dalam perekonomian.

Ratio uang kartal pada tahun 1990 mulai membaik yaitu naik menjadi 38,8 persen, kemudian pada tahun 1991 ratio uang kartal mengalami penurunan menjadi 35,5 persen terhadap jumlah uang beredar. Pada tahun 1991 uang kartal sebanyak Rp. 9 346 miliar dan jumlah uang giral sebanyak Rp. 16 995 miliar dari jumlah uang beredar yaitu sebesar Rp. 26 341 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase uang kartal mengalami penurunan.

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 bahwa selama periode pengamatan tahun 1987-1997, ratio uang kartal tidak pernah melebihi ratio uang giral. Selanjutnya posisi jumlah uang beredar (M_1) selalu mengalami peningkatan, di mana terlihat pada tabel 4.4 tahun 1987, jumlah uang beredar sebesar Rp. 12 685 miliar, meingkat pada tahun berikutnya menjadi Rp. 14 392 miliar, sampai dengan tahun 1997 jumlah uang beredar mencapai Rp. 78 343 miliar

di mana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1997, terjadi peningkatan sebesar Rp. 14 254 miliar.

Keadaan ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran komponen uang beredar dalam perekonomian Indonesia yang mengarah pada peningkatan peranan uang giral, hal ini memberikan indikasi bergesernya sektor moneter Indonesia, ke sektor moneter yang lebih modern, dan ini berarti bahwa semakin meluasnya monetisasi perekonomian di Indonesia.

Tabel 4.4
Posisi Jumlah Uang Beredar Di Indonesia
Tahun 1987-1997
(Dalam Miliar Rupiah)

Thn	U. Kartal		U. Giral		Posisi JUB	Perubahan %
	Rp	%	Rp	%		
1987	5 782	45,6	6 903	54,4	12 685	-
1988	6 246	43,4	8 146	56,6	14 392	39,6
1989	7 426	36,9	12 688	63,1	20 114	39,6
1990	9 156	38,8	14 456	61,2	23 612	17,4
1991	9 346	35,5	16 895	64,5	26 341	11,6
1992	11 478	39,9	17 301	60,1	28 779	9,3
1993	14 431	39,2	22 374	60,8	36 805	27,9
1994	18 634	41,1	26 740	58,9	45 574	23,3
1995	20 807	59,5	31 870	60,5	52 677	16,1
1996	22 487	35,1	41 602	64,9	64 089	21,7
1997	28 424	36,7	49 919	63,7	78 343	22,2

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai terbitan.

4.3 Pengeluaran Pemerintah

Sejak Indonesia memasuki era baru dalam pembangunan ekonominya, kebijaksanaan fiskal merupakan alat kebijaksanaan pemerintah yang penting untuk melaksanakan trilogi pembangunan yaitu terus mengusahakan kemantapan stabilitas nasional khususnya stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan mengusahakan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke arah terwujudnya keadilan sosial.

Pola kebijaksanaan fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara anggaran belanja negara secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dicegah adanya defisit anggaran yang dapat menimbulkan inflasi.

Namun kebijaksanaan keuangan negara tidak semata-mata diarahkan untuk menciptakan anggaran yang berimbang, akan tetapi berimbang dalam jumlah yang semakin meningkat. Hal ini terutama dicapai melalui peningkatan penerimaan dalam negeri dan terus diusahakan penghematan-penghematan pada pengeluaran rutin tanpa mengurangi kebutuhan untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat diciptakan tabungan pemerintah yang semakin meningkat dan mampu membiayai pembangunan dengan sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri.

Selama periode tahun 1987/1988 - 1997/1998, terca-

tat pengeluaran pemerintah secara absolut terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari Rp. 26 961 miliar dalam tahun 1987/1988 menjadi Rp. 101 087 miliar dalam tahun 1997/1998. Ini berarti bahwa selama sebelas tahun (1987/1988 - 1997/1998) terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, dengan rata-rata laju pertumbuhan 15,2 persen per tahun.

Tabel 4.5

Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
Tahun 1987/1988-1997/1998
(Miliar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran		Jumlah
	Rutin	Pembangunan	
1987/1988	17 481	9 479	26 961
1988/1989	20 739	12 251	32 990
1989/1990	24 331	13 834	38 165
1990/1991	29 998	19 452	49 450
1991/1992	30 228	21 764	51 992
1992/1993	33 605	26 906	60 511
1993/1994	40 290	28 428	68 718
1994/1995	44 069	30 692	74 761
1995/1996	52 541	29 812	82 353
1996/1997	61 568	33 454	95 022
1997/1998	62 159	38 328	101 087

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

Meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun, sudah cukup menggambarkan bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian cukup dominan dan benar-benar membawa

pengaruh perlipatan yang besaar dalam seluruh perekonomian. Ini disebabkan karena apa yang dikerjakan pemerintah adalah proyek-proyek yang banyak sekali mempunyai kaitan ke depan maupun kebelakang, terutama berupa proyek-proyek yang bersifat publik dan kurang menarik bagi pengusaha swasta.

Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada tabel 4.5, ditunjukkan bahwa pada tahun 1987/1988 pengeluaran rutin sebesar Rp. 17 482 miliar, meningkat menjadi Rp. 20 739 miliar pada tahun 1988/1989, terus meningkat lagi menjadi Rp. 24 331 pada tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1997/1998 meningkat menjadi Rp. 62 159 miliar atau rata-rata pengeluaran rutin pemerintah 61,2 persen per tahun.

Salah satu pos terbesar dari pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk belanja pegawai. Pengeluaran ini sangat penting, karena selain menyangkut kesejahteraan pegawai pemerintah, juga langsung menyangkut efisiensi roda pemerintahan. Sejak tahun 1987/1988 sampai dengan tahun 1997/1998, belanja pegawai senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari Rp. 4 617 miliar pada tahun 1987/1988, menjadi 4 998 miliar pada tahun 1988/1989, kemudian pada tahun 1989/1990 mencapai Rp. 6 201 miliar dan seterusnya sampai dengan tahun 1997/1998 mencapai Rp 21 192 miliar (lihat tabel 4.6).

Tabel 4.6
Komponen Pengeluaran Rutin
Tahun 1987/1988-1997/1998
(Miliar Rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Subsidi Daerah Otonom	Bunga & Cicilan Utang	Lain-lain	Jumlah
1987/88	4 617	1 329	2 815	8 204	515	17 480
1988/89	4 998	1 492	3 038	10 948	271	20 739
1989/90	6 201	1 702	3 566	11 393	923	24 331
1990/91	7 054	1 830	4 236	13 395	3 463	29 998
1991/92	8 102	2 373	4 844	13 434	1 484	30 228
1992/93	9 554	2 928	5 383	14 524	1 216	33 605
1993/94	11 145	3 032	6 909	17 163	2 041	40 290
1994/95	12 595	4 319	7 273	18 402	1 480	44 069
1995/96	15 372	5 274	8 344	21 434	2 117	52 541
1996/97	18 021	7 244	9 841	23 432	3 031	61 568
1997/98	21 192	8 895	11 536	19 571	965	62 159

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia

Kebijaksanaan peningkatan mutu dan jumlah pelayanan pemerintah, tercermin pula dalam pengeluaran untuk subsidi daerah otonom. Pengeluaran ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah untuk mencukupi anggaran rutinnya dan untuk penyempurnaan administrasi daerah. Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1987/88 tercatat pengeluaran ini sebesar Rp. 2 815 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 3 038 pada tahun 1988/89. Selanjutnya pada tahun 1989/90 mencapai angka Rp. 3 566 miliar dan terus meningkat lagi pada tahun 1990/91 menjadi Rp. 4 236 miliar, sampai dengan tahun 1997/98 mencapai

Rp. 11 536 miliar, (lihat tabel 4.6). Pemberian subsidi kepada daerah otonom juga dimaksudkan untuk lebih meratakan hasil-hasil pembangunan di daerah-daerah, terutama di daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) sendiri lebih kecil. Secara umum pengeluaran untuk subsidi daerah otonom, sebagian besar ditujukan untuk membayar gaji dan pensiun pegawaidaerah otonom dan pegawai pegawai sipil pusat yang diperbantukan di daerah.

Selanjutnya untuk belanja barang, pelaksanaannya selalu disesuaikan dengan tahap-tahap tingkat pembangunan yang semakin berkembang. Pembelian pemerintah diarahkan pada pembelian barang-barang produksi dalam negeri dan barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan banyak tenaga kerja. dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, maka belanja barang menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1987/88 belanja barang baru mencapai Rp. 1 329 miliar, maka pada tahun 1988/89 telah meningkat menjadi Rp. 1 492 miliar, pada tahun 1989/1990 sebesar Rp. 1 702 miliar, meingkat lagi menjadi Rp. 1 830 pada tahun 1990/91 dan sampai dengan tahun 1997/98 belanja barang telah mencapai Rp. 8 895 miliar.

Komponen pengeluaran rutin terbesar lainnya adalah pembayaran bunga dan cicilan utang. Kebijakan pembayaran bunga dan cicilan utang, terutama utang-utang luar negeri, ditujukan agar tidak menyebabkan gangguan

terhadap program-program pembangunan dan stabilitas yang telah dicapai. Untuk itu diusahakan agar pembayaran kembali utang-utang tersebut tidak menjadi beban yang terlampau berat terhadap anggaran belanja negara. Dalam hal pembayaran hutang dalam negeri, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam perkembangannya, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri mengalami peningkatan dari tahun 1987/88 sampai dengan tahun 1996/97. Sementara pada tahun 1997/98 pembayaran bunga dan cicilan utang mengalami penurunan yaitu pada tahun 1996/97 sebesar Rp. 23 432 miliar, turun menjadi Rp. 19 571 miliar pada tahun 1997/98. Penurunan pembayaran bunga dan cicilan utang tersebut terjadi antara lain penyebabnya adalah terjadinya gejolak moneter di Indonesia, khususnya masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS.

Pos lain-lain pada pengeluaran rutin mempunyai perkembangan yang agak berbeda dengan pos-pos pengeluaran rutin yang tersebut sebelumnya, dimana pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tabel 4.6 terlihat bahwa tahun 1987/88 pos lain-lain sebesar Rp. 515 miliar, dan pada tahun 1988/89 turun menjadi Rp. 271 miliar, kemudian pos pengeluaran ini meningkat pesat sehingga pada tahun 1989/90 menjadi Rp. 923 miliar, terus meningkat sampai Rp 3 483 miliar pada tahun 1990/91. Setelah itu kembali mengalami penurunan sampai tahun 1997/98 menjadi Rp. 965

miliar. Fluktuasi yang demikian ini disebabkan pos lain-lain dalam pengeluaran rutin ini menampung pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga yang hanya timbul pada tahun tertentu, seperti pembiayaan pemilihan umum dan lain-lain.

Sejalan dengan peningkatan pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 1995/96 pengeluaran pembangunan mengalami penurunan. Bila pada tahun 1988/89 pengeluaran pembangunan hanya sebesar Rp. 12 251 miliar, maka pada tahun 1989/90 telah mencapai Rp. 13 834 miliar. Pada tahun 1990/91 meningkat dengan pesat sehingga menjadi Rp. 19 452 miliar, kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 21 764 miliar pada tahun 1991/92, dan sampai pada tahun 1994/95 mencapai angka Rp. 30 692 miliar. Pada tahun 1996/96 turun menjadi Rp. 29 812 terus meningkat kembali sampai pada tahun 1997/98 menjadi Rp. 38 928 miliar. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan rata-rata selama periode 1988/89-1997/98 sebesar 12,9 persen per tahun.

Peningkatan pengeluaran pembangunan tersebut, selalu disesuaikan dengan dana pembangunan yang tersedia untuk menjaga keseimbangan anggaran secara menyeluruh dalam rangka memelihara kestabilan ekonomi.

Pembangunan sektoral dilaksanakan terutama melalui departemen/lembaga, sedangkan dalam rangka mengusahakan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan dapat disebarkan

lebih merata diseluruh daerah serta dapat mendorong partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan terutama melalui proyek-proyek yang bersifat padat karya, maka juga diberikan bantuan pembangunan kepada daerah.

Pos pengeluaran untuk pembiayaan departemen/lembaga pada umumnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 1995/96 mengalami penurunan. Pada tahun 1988/89 pengeluaran ini mencapai Rp. 1 856 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 2 509 miliar pada tahun 1989/90. Pada tahun 1994/95 telah mencapai Rp. 11 239 miliar, kemudian turun menjadi Rp. 10 429 miliar pada tahun 1995/95. Selanjutnya pada tahun 1996/97 kembali meningkat menjadi Rp. 12 083 miliar sampai pada tahun 1997/98 mencapai Rp. 14 915 miliar.

Pengeluaran untuk pembangunan daerah dimaksudkan antara lain untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat desa dalam rangka pengembangan secara berencana, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, untuk menserasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan regional dalam rangka mengusahakan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah.

Atas dasar kebijaksanaan tersebut, maka pengeluaran ini senantiasa diusahakan terus meningkat. Pada tahun 1988/89 pengeluaran ini Rp. 1 491 miliar, meningkat menjadi Rp. 1 719 miliar. Demikian juga pengeluaran ini meningkat menjadi Rp. 2 998 miliar pada tahun 1990/91

sampai pada tahun 1994/95 sebesar Rp. 7 353 miliar, setelah itu pada tahun 1995/96 sedikit menurun menjadi Rp. 7 319 miliar dan kembali meningkat menjadi Rp. 9 910 miliar. Peningkatan pengeluaran untuk pembangunan daerah tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya jenis pengeluaran untuk pembangunan daerah sehingga sudah barang tentu meningkatkan pembiayaannya.

Tabel 4.7

Komponen Pengeluaran Pembangunan

Tahun 1988/89-1997/98

(Miliar Rupiah)

Tahun	Departemen (Lembaga)	Pembangunan Daerah	Pembiayaan Lainnya	Bantuan Proyek	Jumlah
1988/89	1 856	1 491	954	7 950	12 521
1989/90	2 509	1 719	1 184	8 422	13 834
1990/91	4 853	2 998	1 093	8 508	19 452
1991/92	5 971	3 953	1 494	8 846	21 764
1992/93	10 033	5 035	1 257	10 581	26 906
1993/94	10 916	5 516	1 243	10 753	28 428
1994/95	11 239	7 353	2 262	9 838	30 692
1995/96	10 429	7 319	894	11 170	29 812
1996/97	12 083	8 489	1 834	11 048	33 454
1997/98	14 915	9 910	1 077	13 026	38 928

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesai.

Pada tabel 4.7, nampak bahwa pengeluaran untuk lain-lain pembiayaan pembangunan mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 1988/89 lain-lain pembiayaan pembangunan sebesar Rp. 954 miliar, kemudian

meningkat menjadi Rp. 1 164 miliar pada tahun 1989/90, pada tahun 1990/91 turun sehingga menjadi Rp. 1 093 miliar dan kembali mengalami kenaikan pengeluaran ini menjadi Rp. 1 494 miliar pada tahun 1991/92. Selanjutnya tahun-tahun berikutnya terus berfluktuasi hingga tahun 1997/98 mencapai Rp. 1 077 miliar. Terjadinya penurunan dalam komponen lain-lain pembiayaan pembangunan antara lain disebabkan oleh terjadinya penurunan tabungan pemerintah.

Salah satu pos terbesar pada komponen pengeluaran pembangunan adalah bantuan proyek (lihat tabel 4.7). Bantuan proyek diprioritaskan kepada proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja, mempunyai dampak ganda besar, dan mengandung kadar impor yang rendah, dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan sektor swasta, pengembangan sumber daya manusia, perluasan pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Seperti pada tabel 4.7, pada umumnya pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 1994/95 dan tahun 1996/97. Pada tahun 1988/89 pengeluaran untuk bantuan proyek sebesar Rp. 7 950 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 8 422 miliar, pada tahun 1989/90. Samapai pada tahun 1993/94 meningkat sehingga mencapai Rp. 10 753 miliar, pada tahun 1994/95 mengalami penurunan menjadi Rp. 9 838 miliar, terus meningkat lagi menjadi Rp. 11 170 pada tahun 1995/1996

selanjutnya. turun lagi pada tahun berikutnya, kemudian pada tahun 1997/98 kembali meningkat mencapai Rp. 13 026 miliar.

Dari pembahasan mengenai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, maka jelas ada peningkatan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun selama periode tahun 1987/1988 - 1997/98. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya usaha pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian disamping adanya keinginan pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya sebagai sektor yang berperan besar.

4.4 Ekspor

Ekspor Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kelompok minyak bumi dan gas alam cair (migas), dan kelompok komoditi non migas yang terdiri dari komoditi primer dan komoditi bukan primer yang selama ini menjadi andalan pemasukan devisa. Komoditi primer merupakan hasil dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sedangkan komoditi bukan primer berasal dari sektor industri.

Dalam periode 1987 - 1997 ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tahun 1987 nilai ekspor tercatat US\$ 17 135,6 juta, kemudian meningkat mencapai US\$ 19 218,5 juta pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1989 telah mencapai US\$ 22 158,9 juta, terus meningkat lagi dan mencapai US\$ 25 675,3 juta, dan seterusnya sampai dengan tahun 1997 nilai

ekspor Indonesia mencapai sebesar US\$ 53 546,9 juta. (untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.8).

Tabel 4.8
Perkembangan Ekspor Indonesia
Tahun 1987-1997
(US\$ Juta)

Tahun	Migas	%	Non Migas	%	Jumlah
1987	8 556,0	49,9	8 579,6	50,1	17 135,6
1988	7 681,6	39,9	11 536,9	60,1	19 218,5
1989	8 678,6	39,2	13 480,1	60,8	22 158,9
1990	11 071,1	34,1	14 504,2	56,9	25 675,3
1991	10 894,9	37,4	18 247,5	62,6	29 142,4
1992	9 745,8	26,5	27 077,2	73,5	36 828,0
1993	9 693,7	24,2	30 359,7	75,8	40 053,4
1994	9 754,2	23,9	34 746,4	76,1	44 500,6
1995	10 464,6	23,0	34 953,4	77,0	45 418,0
1996	11 722,0	23,5	38 092,9	76,5	49 814,9
1997	11 443,8	21,4	42 103,1	78,6	53 546,9

Sumber: Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1997, ekspor non migas mendominasi pemasukan devisa. Dimana kontribusinya terhadap ekspor rata-rata sebesar 67,3 persen per tahun. Kalau pada tahun 1987 peranannya baru mencapai 50,1 persen dari total ekspor Indonesia, pada tahun 1988 telah meningkat menjadi 60,1 persen. Kemudian meningkat lagi menjadi 60,8 persen pada tahun 1989. Namun pada tahun 1990 peranannya menurun terhadap total ekspor yaitu menjadi 56,9 persen. Setelah itu kembali meningkat sampai pada tahun 1995, dan menurun lagi pada tahun 1996 yaitu kontribusinya hanya sebesar

76,5 persen yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan menjadi 78,6 persen pada tahun 1997.

Adanya peningkatan pemasukan devisa dari komoditi ekspor non migas, sejalan dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan peranan ekspor non migas untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas yang sejak dasawarsa delapan puluhan harga minyak bumi di pasaran internasional mengalami kemerosotan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengadakan diversifikasi penerimaan ke arah peningkatan produksi serta peningkatan ekspor komoditi dan jasa-jasa non migas. Di samping itu diusahakan pula pengendalian impor secara efisien, misalnya dengan pemanfaatan modal, pinjaman teknologi luar negeri, pengelolaan hutang-hutang luar negeri yang lebih terarah, diversifikasi pasaran komoditi non migas serta pengendalian cadangan devisa.

Komoditi ekspor migas peranannya terhadap total nilai ekspor Indonesia hanya rata-rata 32,7 persen per tahun selama periode tahun 1987-1997. Hal ini erat kaitannya dengan adanya penurunan permintaan negara-negara pengimpor minyak terbesar seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dan Taiwan. Selain itu, juga disebabkan oleh harga minyak di pasaran internasional mengalami penurunan, seperti halnya dengan harga ekspor minyak mentah Indonesia di luar negeri terutama di Jepang yang turun dari US\$ 0,140 per kg pada periode juni 1996 menja-

di US\$ 0,130 per kg pada tahun 1997.

4.5 Pengaruh Penawaran Uang, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam sub bab ini akan dibandingkan pendapat antara aliran moneteris dengan aliran Keynesian. Kemudian akan diuraikan pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto. Sesuai dengan namanya aliran moneteris menitikberatkan pada peranan jumlah uang beredar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bahkan aliran ini menegaskan bahwa antara jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang langsung dan dapat dipercaya. Sebab jika diadakan penambahan jumlah uang beredar akan meningkatkan pengeluaran dan menaikkan employment dan output riil.

Menurut Keynesian perubahan dalam pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui proses multiplier. Dalam kerangka kerja proses multiplier ini suatu perubahan yang otonom akan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi.

Untuk membandingkan kedua pendapat tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan analisa regresi berganda. Dari sini dapat diketahui besarnya pengaruh jumlah penawaran uang dan pengeluaran pemerintah terhadap pertum-

buhan ekonomi yang diwakili oleh produk domestik bruto. Dalam analisa regresi berganda ini akan dimasukkan variabel ekspor sebagai salah satu variabel yang turut mempengaruhi produk domestik bruto.

Dengan menggunakan data time series dari tahun 1987-1997, diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = 1,662 + 0,740 \text{ Ln } X_1 + 0,709 \text{ Ln } X_2 + 1,057 \text{ Ln } X_3$$

(4,623)
(2,003)
(2,396)

- angka dalam kurung adalah nilai statistik uji - t.
- koefisien korelasi regresi berganda, $R = 0,998$.
- koefisien determinasi, $R^2 = 0,996$.
- statistik uji F = 530,882.

Koefisien korelasi jumlah uang beredar (X_1) muncul dengan tanda yang sesuai dengan yang diharapkan, berhubungan positif. Hal ini berarti bahwa jika jumlah uang beredar bertambah, maka produk domestik bruto (Y) akan meningkat. Hal yang sama juga berlaku pada pengeluaran pemerintah (X_2) yang juga berhubungan positif dengan produk domestik bruto (Y), yang berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah bertambah, maka produk domestik bruto juga akan bertambah. Demikian pula dengan ekspor (X_3) juga berhubungan positif dengan produk domestik bruto. Hal ini berarti apabila ekspor bertambah, maka produk domestik bruto juga akan bertambah.

Adapun besarnya koefisien jumlah uang beredar

adalah 0,740 sebagaimana yang nampak pada hasil regresi, berarti bahwa jika jumlah uang beredar bertambah 1 persen, maka produk domestik bruto akan meingkat 0,740 persen. Kemudian besarnya koefisien pengeluaran pemerintah adalah 0,709, yang berarti bahwa jika pengeluaran pemerintah bertambah 1 persen, maka pengaruhnya terhadap peningkatan produk domestik bruto adalah sebesar 0,709 persen. Dan besarnya koefisien ekspor adalah 1,057 yang berarti bahwa apabila nilai ekspor bertambah 1 persen, maka produk domestik bruto akan bertambah sebesar 1,057 persen.

Untuk melihat keeratan hubungan antara jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan ekspor dengan produk domestik bruto, maka dapat dilihat pada besarnya koefisien determinasi (R^2). Pada hasil regresi nampak bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,996 yang berarti bahwa sekitar 99 persen variasi naik turunnya produk domestik bruto yang disebabkan oleh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 1 persen yang disebabkan oleh faktor-faktor lain.

Kemudian untuk melihat apakah jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah dan ekspor secara individu mempunyai pengaruh yang berarti terhadap produk domestik bruto, dapat dilihat pada nilai uji t. Untuk variabel jumlah uang beredar diperoleh nilai t hitung sebesar

4,632, sedangkan nilai t tabel pada tingkat kepercayaan 5 persen dan derajat bebas 7 sebesar 1,895. Terlihat bahwa t tabel lebih kecil dari nilai t hitung, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jumlah uang beredar signifikan terhadap produk domestik bruto. Kemudian untuk variabel pengeluaran pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,003 yang signifikan pengaruhnya terhadap PDB pada tingkat kepercayaan 5 persen dan derajat bebas 7. Dan untuk variabel ekspor diperoleh nilai t hitung sebesar 2,396 yang juga signifikan pengaruhnya terhadap PDB pada tingkat kepercayaan 5 persen dan derajat bebas 7.

Untuk menguji tingkat signifikansi variabel-variabel tersebut secara menyeluruh, dipergunakan statistik uji F. Pada hasil regresi yang telah dikemukakan diperoleh nilai F hitung sebesar 530,882 yang ternyata lebih besar daripada nilai F tabel pada derajat bebas 3 dan 7 yaitu hanya sebesar 4,35. Dengan demikian keseluruhan variabel secara bersama-sama dikatakan signifikan pengaruhnya terhadap PDB pada tingkat kepercayaan 5 persen.

Dari pembahasan hasil regresi tadi, maka hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya terbukti kebenarannya bahwa hubungan dan pengaruh penawaran uang dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB adalah positif dan signifikan. Demikian juga hubungan dan pengaruh ekspor terhadap PDB adalah positif dan signifikan.

BAB V
PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan masalah yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penawaran uang (jumlah uang beredar) adalah merupakan suatu variabel ekonomi yang dapat diketahui besarnya pada suatu waktu tertentu. Besar kecilnya jumlah uang beredar, ditentukan oleh otoritas moneter yaitu pemerintah dan bank Indonesia. Dengan demikian naik turunnya jumlah uang beredar ditentukan oleh otoritas moneter tersebut.
2. Proses transmisi dari sektor moneter ke sektor riil yang dikemukakan oleh aliran moneteris ternyata dapat dibuktikan dengan menggunakan data perekonomian Indonesia. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi gangguan dalam sektor moneter Indonesia, misalnya otoritas moneter melakukan kebijakan ekspansif (menambah jumlah uang beredar) atau kebijakan kontraktif (mengurangi jumlah uang beredar), maka langsung berpengaruh terhadap sektor riil.
3. Perubahan jumlah uang beredar di Indonesia mempunyai

Pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Artinya jika jumlah uang beredar bertambah, maka produk domestik bruto akan meningkat. Untuk setiap kenaikan 1 persen jumlah uang beredar akan meningkatkan produk domestik bruto sebesar 0,740 persen.

4. Peningkatan yang pesat dalam pengeluaran pemerintah adalah merupakan suatu usaha pemerintah sebagai salah satu sektor perekonomian untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya. Hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah bukan saja dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produk domestik bruto.
5. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada umumnya masih didominasi oleh pengeluaran rutin (sekitar 61 persen dari jumlah pengeluaran pemerintah), dan dilihat dari komponennya pengeluaran rutin selama sepuluh tahun didominasi oleh pembayaran bunga dan cicilan utang, satu tahun terakhir bergeser ke belanja pegawai. Hal yang sama juga terjadi pergeseran dalam komponen pengeluaran pembangunan, yang secara umum dapat disimpulkan bahwa penekanan/prioritas pengeluaran pemerintah bergeser dari pengeluaran melalui bantuan proyek ke pola yang agak seimbang antara pengeluaran departe-

- men, pembangunan daerah serta pembiayaan lainnya.
6. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Untuk setiap 1 persen kenaikan pengeluaran pemerintah, akan meningkatkan produk domestik bruto sebesar 0,709 persen.
 7. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa bagi pembiayaan pembangunan. Perkembangan ekspor Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan harga internasional, terutama perkembangan harga minyak dan permintaan negara-negara pengimpor minyak. Di lain pihak pengaruh ekspor terhadap produk domestik bruto cukup besar. Untuk setiap kenaikan 1 persen dalam nilai ekspor, akan meningkatkan produk domestik bruto sebesar 1,057 persen.
 8. Hubungan dan pengaruh penawaran uang, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap PDB adalah positif dan signifikan.

5.2 Saran-saran

1. Dalam menjalankan kebijaksanaan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar, maka otoritas moneter harus senantiasa memantau perkembangan jumlah uang beredar agar selalu sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian otoritas moneter harus dapat meningkatkan mobilisasi dana-dana masyarakat dan

dapat meningkatkan mobilisasi dana-dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada sektor-sektor ekonomi yang dianggap paling produktif.

2. Diperlukan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluarannya dan terus melakukan pengawasan atas penggunaan uang negara. Tanpa ini semua berarti peningkatan pengeluaran pemerintah hanya akan memberikan dan menciptakan peluang-peluang bagi penyalagunaannya.
3. Pemerintah dan pengusaha swasta harus aktif melakukan promosi untuk memperkenalkan komoditi-komoditi ekspor Indonesia di luar negeri, melakukan diversifikasi pasar yang dianggap potensial bagi pemasaran komoditi ekspor Indonesia.
4. Karena ekspor mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap produk domestik bruto bila dibandingkan dengan penawaran uang dan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan ekspor baik nilai maupun volumenya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Boediono, Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM 1988
- Indrawati, Sri M, Teori Ekonomi Moneter, LPFE-UI 1988.
- Iswara G.A. dan Nopirin, Teori Moneter, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta 1986.
- Jafar, Syamsuddin, Ekonomi Moneter, Penerbit Kota Kem- bang Yogyakarta, 1993
- Luckett, D.G. Uang dan Perbankan, diindonesiakan oleh Paul C. Rosyadi, Edisi kedua Erlangga, Jakarta 1983.
- Partadireja, Ace, Perhitungan Pendapatan Nasional, Ce- takan Keempat, LP3S, Jakarta 1983
- Soeparmoko, Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek, Edisi Ketiga, BPFE-UGM, Yogyakarta 1986
- Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Jakarta 1994.
- Supranto, J. Ekonometrika, Buku I dan II, Edisi I, LPFE UI, Jakarta 1983.
- Panetto, Abdul Rahman, Beberapa Aspek Teori dan Pengim- plementasian Kebijakan Moneter Dalam Pembangun- an dengan Kasus Indonesia, Ujung Pandang, 1996.
- Winardi, Pengantar Ekonomi Moneter, Buku I, Tarsito, Bandung, 1987

B. Artikel - Artikel/Terbitan

- Bank Indonesia : Laporan Tahunan, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Biro Pusat Statistik : Statistik Indonesia
- Biro Pusat Statistik : Pendapatan Nasional

LAMPIRAN

Untuk mendapatkan nilai PDB tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 berdasarkan pada harga konstan 1983, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

* Jika diketahui IHK 1994 = 163,17 (1983 = 100), maka :

$$\begin{aligned} PDB_{HK83} \text{ untuk tahun 1994} &= \frac{100}{163,17} 382\ 219,2 \\ &= \text{Rp. 234 246 Miliar.} \end{aligned}$$

* Jika diketahui IHK 1995 = 177,8 (1983 = 100), maka :

$$\begin{aligned} PDB_{HK83} \text{ untuk tahun 1995} &= \frac{100}{177,8} 452\ 380,9 \\ &= \text{Rp. 254 432,45 Miliar} \end{aligned}$$

* Jika diketahui IHK 1996 = 189,62 (1983 = 100), maka:

$$\begin{aligned} PDB_{HK83} \text{ untuk tahun 1996} &= \frac{100}{189,62} 532\ 630,8 \\ &= \text{Rp. 280 893,78 Miliar.} \end{aligned}$$

* Jika diketahui IHK 1997 = 211,62 (1983 = 100)

$$\begin{aligned} PDB_{HK83} \text{ untuk tahun 1997} &= \frac{100}{211,62} 624\ 337,1 \\ &= \text{Rp. 295 027,45 Miliar} \end{aligned}$$